

ABSTRAK

Korupsi merupakan tindak pidana yang terkualifikasi sebagai *extraordinary crime* yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga sudah menjadi kewajiban negara guna memerangi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam memberantas tindak pidana korupsi dibutuhkan keseimbangan oleh *criminal Justice system*, terutama bagi penyidik tindak pidana korupsi yang memiliki fungsi utama guna mencari barang bukti dalam membuat terang suatu perkara dan mencari tersangka dalam perkara tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan pustaka dan meneliti dokumen untuk menjawab permasalahan hukum, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian yakni mengenai pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi penyidik terkhusu tpenyidik tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya urgensi pengaturan tentang perlindungan bagi penyidik korupsi dengan beberapa faktor yang pertama terkait angka korupsi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, adanya kesenjangan pengaturan perlindungan antara tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme dan tindak pidana korupsi dalam perlindungan hukum bagi penyidik tindak pidana , dimana dalam tindak pidana narkoba dan tindak pidana terorisme menjamin perlindungan bagi penyidik yang dituangkan dalam peraturan perundang – undangan, yang tidak dimiliki oleh penyidik tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya kekosongan hukum dalam perlindungan penyidik tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Urgensi Perlindungan, Penyidik, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

Corruptio is a crime that is qualified as an extraordinary crime which has increased every year. So it has become the state's obligation to combat the eradication of corruption. In combating corruption, a balance is needed by the criminal justice system, especially for investigation of criminal acts of corruption who have the primary function of looking for evidence in making light of a case and looking for a suspect in the case.

The research method use in a normative legal research method the examines library material and examines documents to answer legal issues, using the statue approach by examines all laws and regulation relating to legal issues in research namely regarding the regulation of protaction the law for investigators of criminal acts of corruption

The results of this study indicate that there is an urgency in regulating the protection of corruption investigators with the first few factor related to the numbers of corruption which every year hasincreased, there is a gap in the protection arragements between narcotics, terrorism and corruption in the legal in the legal protection of investigators, where in narcotics, and terrorism criminal act guarantees protection for investigators as outlined in the legislation, which is No. owned b investigators criminal act corruption, so it can be said that there is a legal vacuum in the protection of invesgators into criminal acts of corruption.

Keywords : Urgency of protection, investigators, corruption.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTACK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Kegunaan	7
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Peneletian	9
1.6.1Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Bahan Hukum	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Metode Analisa Data	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA URGENSI PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENYIDIK DALAM PERKARA KORUPSI

2.1 Perlindungan Hukum Bagi Penegak Hukum	15
---	----

2.2 Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Penegak Hukum Dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia	23
2.3 Penyidik Tindak Pidana Korupsi	27
BAB III : URGensi PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN BAGI PENYIDIK DALAM PERKARA KORUPSI	
3.1 Urgensi Perlindungan Hukum	32
3.2 Perindungan Hukum Penyidik Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia	41
BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Keaslian Skripsi	8
TABEL 2.1 Tabel Perlindungan bagi penyidik Tindak Pidana Narkotika, dan Tindak Pidana Terorisme	20
TABEL 2.2 Kewenangan penyidik Tindak Pidana Korupsi	25
TABEL 2.3 Data statistik penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	30
TABEL 3.1 Statistik Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	38
TABEL 3.2 Tabel Perbandingan perlindungan Tindak pidana Korupsi, Tindak Pidana Narkotika, dan Tindak Pidana Terorisme	40
TABEL 3.3 Kewenangan Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan tindak pidana korupsi	46